PEMALSUAN GELAR AKADEMIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN PROFESI DI BUMD KOTA TANJUNGPINANG

Afriyadi *¹
Livia Antania ²
Melva Sinaga ³
Nadhia Febriyani ⁴
Nurwanda Dwi Maulidia ⁵
Salsabilla Nimas Brilianza ⁶
Silvy Pricilia Fernanda ⁷
Siti Aisyah Rukmana ⁸
Vivin Irawati ⁹

¹ Dosen Program Studi Akuntansi STIE Pembangunan Tanjungpinang
^{2,3,4,5,6,7,8,9} Mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE Pembangunan Tanjungpinang
*e-mail: liviaantania2005@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kasus pemalsuan gelar yang melibatkan direktur utama salah satu perilaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Tanjungpinang dan dampaknya terhadap etika bisnis dan profesi. Pemalsuan gelar merupakan kejahatan serius yang dapat merusak integritas dan kredibilitas individu dan organisasi. Penggunaan ijazah yang tidak sesuai dengan format dan kode etik akan merusak reputasi institusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melalui pendekatan studi kasus untuk menilai dampak penipuan gelar terhadap etika bisnis dan profesi. Temuan menunjukkan bahwa pemalsuan ijazah berdampak negatif terhadap reputasi BUMD dan menimbulkan berbagai tantangan etika yang perlu diatasi. Denda sebesar 5 juta akan dikenakan jika terdakwa diampuni tanpa mengikuti format dan singkatan yang disetujui oleh universitas dan tanpa memberikan alasan atau alasan.

Kata Kunci : Pemalsuan Gelar, Etika Bisnis, Etika Profesi, BUMD, Tanjungpinang

Abstract

This research analyzes a case of degree falsification involving the main director of one of the Regional Owned Enterprises (BUMD) in Tanjungpinang City and its impact on business and professional ethics. Falsification of degrees is a serious crime that can damage the integrity and credibility of individuals and organizations. Using diplomas that do not comply with the format and code of ethics will damage the institution's reputation. The method used in this research is a qualitative method using a case study approach to assess the impact of degree fraud on business and professional ethics. The findings show that forgery of diplomas has a negative impact on the reputation of BUMD and raises various ethical challenges that need to be addressed. A fine of 5 million will be imposed if the accused is pardoned without following the format and abbreviations approved by the university and without providing reasons or excuses.

Keywords: Falsification of Degrees, Business Ethics, Professional Ethics, BUMD, Tanjungpinang

PENDAHULUAN

Menurut (Beekun, 2004), definisi dari etika merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral sehingga dapat membedakan hal yang baik dari yang buruk. Etika bisnis adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang diterapkan dalam dunia usaha dengan memperhatikan serta mematuhi norma-norma sosial dan prinsip-prinsip moral. Dalam konteks ini, berbisnis mencakup semua aktivitas ekonomi yang dilakukan baik oleh individu perseorangan maupun oleh entitas usaha atau perusahaan. Setiap langkah dan keputusan dalam bisnis, baik yang berskala kecil maupun besar, diharapkan selalu berlandaskan pada etika yang baik, agar selain mencapai keuntungan materi, juga dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, etika bisnis menjadi panduan penting dalam menjalankan usaha yang bertanggung jawab dalam berkelanjutan bisnisnya.

Etika bisnis mencakup tindakan sesuai dengan peraturan dan tatanan nilai serta standar norma sosial yang berlaku pada masyarakat sosial. Dalam konteks perusahaan atau wirausaha,

etika bisnis berfungsi sebagai pedoman atau standar yang harus diikuti oleh karyawan dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, etika bisnis menjadi patokan untuk segala tindakan yang diambil harus sesuai dengan pasti pada aturan-aturan yang ada dan mencerminkan integritas moral. Ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang etis dan bertanggung jawab, serta mendukung keberlanjutan dan reputasi baik perusahaan. Apabila etika bisnis tidak dijalankan dengan benar, dapat mengganggu *going concern* sebuah perusahaan atau usaha, baik secara tidak langsung ataupun secara langsung, serta dalam waktu jangka pendek hingga waktu jangka panjang. Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti rusaknya reputasi perusahaan hingga munculnya sanksi hukum. Dampak negatif tentunya membawa kerugian finansial secara signifikan dan bahkan mengancam keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan atau usaha untuk memastikan bahwa etika bisnis dan profesi selalu dijadikan panduan dalam setiap aspek kegiatan mereka.

Etika profesi merupakan sebuah cerminan sikap hidup dalam keadilan ketika memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat dengan penuh keahlian serta ketertiban. Etika ini bertujuan memastikan bahwa setiap tugas yang dijalankan sebagai kewajiban terhadap masyarakat dilakukan dengan kompetensi tinggi dan tetap dalam kerangka yang teratur. Peran etika bisnis dalam tatanan sistem norma, nilai, serta aturan profesional yang tertulis, dengan tegas memberikan pernyataan mengenai hal apa yang dianggap benar, serta hal apa yang dianggap tidak benar bagi seseorang dengan profesionalitas. Dalam hal ini, etika profesi memiliki peran untuk membantu menjaga integritas dan kualitas layanan yang diberikan oleh para profesional, memastikan mereka bertindak sesuai dengan standar yang diharapkan dalam bidang mereka masing-masing.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan etika bisnis dan profesi, diantaranya pemalsuan gelar akademik yang mencakup tindakan memperoleh atau menggunakan gelar pendidikan yang tidak sah atau palsu yang menjadi isu yang meresahkan di masyarakat. Sebab ada beberapa alasan penting seperti; ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan, kerugian ekonomi, ketidakadilan sosial, gangguan terhadap pelayanan publik, dan kerusakan reputasi institusi pendidikan. Secara keseluruhan, pemalsuan gelar menciptakan gangguan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan profesional. Ini menyebabkan keresahan karena orang merasa tidak dapat lagi mempercayai sistem yang seharusnya menjamin keahlian dan kompetensi profesional.

Fenomena ini semakin sering terjadi dikarenakan kemajuan pada bidang teknologi serta ilmu pengetahuan tanpa diimbangi oleh perkembangan moral dan etika yang sepadan. Akibatnya, kasus pemalsuan ijazah semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak yang signifikan. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam integritas lembaga pendidikan dan profesionalisme di berbagai sektor. Dengan demikian, perlu ada upaya lebih lanjut untuk membangun kesadaran akan pentingnya kejujuran dan integritas dalam pendidikan dan dunia kerja sebagai bentuk perlindungan terhadap praktik yang merugikan ini. Contoh nyata dari dampak negatifnya dapat dilihat di Kota Tanjungpinang, di mana seorang direktur utama dari sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlibat dalam skandal pemalsuan gelar akademik.

Pemalsuan gelar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan pelanggaran terhadap norma-norma etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia akademis. Pemalsuan gelar dalam ijazah termasuk dalam tindakan pemalsuan intelektual (Ichsan dkk., 2022). Tindakan ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga merusak reputasi lembaga pendidikan secara luas. Dengan demikian, penting untuk mengedepankan nilai-nilai etika yang kuat dan memastikan kepatuhan terhadap standar akademis yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas pendidikan. Fenomena ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2022, berdasarkan putusan pengadilan nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemalsuan identitas menggunakan gelar akademik yang di mana seorang perempuan bernama asli Erayani yang kemudian mengaku menjadi seorang laki-laki bernama Ahnaf Arrafif dan mengaku seorang dokter serta menggunakan gelar akademik yang menjadi dr. Ahnaf Arrafif, Sp. BS., S.Art., S.H., S.Hum., sehingga dari penggunaan

gelar tersebut yang merupakan tindak pidana pemalsuan identitas menggunakan gelar akademik yang mengakibatkan menghasilkan korban dan menyebabkan kerugian berupa uang yang totalnya lebih kurang Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) terhadap perseorangan, dan penipuan khalayak ramai (Naufal, 2023).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai bagian dari entitas milik negara yang berperan penting dalam layanan publik dan pengembangan ekonomi daerah, memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga transparansi dan integritas dalam seluruh operasionalnya, termasuk dalam proses pemilihan dan penunjukan pimpinan. Fenomena ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan tentang integritas kepemimpinan di Indonesia.

Bagi orang yang menduduki posisi penting pada suatu organisasi memiliki serta penggunaan gelar akademik merupakan hal yang sangat signifikan, terutama jika gelar tersebut didapatkan dari universitas ternama. Namun, undang-undang melarang penggunaan gelar tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa "Perorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi."

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu. Undang-undang ini mengatur bahwa, "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".

Sanksi hukum pidana juga melekat erat kepada setiap individu yang menggunakan gelar akademik yang tidak sesuai tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara serta denda ini telah diatur pada Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, pelaku penyalahgunaan gelar akademik secara tidak sah dapat dikenai hukuman pidana hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Meskipun ancaman hukuman pelanggaran yang ditetapkan pada tindakan ini termasuk cukup berat, akan tetapi hal tersebut tentunya tidak cukup kuat untuk menghalangi individu dalam melakukan tindakan pemalsuan gelar untuk memperoleh pengakuan serta validasi dari publik. Hal ini kerap dilakukan agar seorang individu agar memiliki labeling bahwa oknum-oknum tersebut memiliki latar belakang pendidikan tinggi walaupun tidak sesuai dengan jenis kemampuan serta kualifikasi yang sebenarnya.

Tindak pidana pemalsuan gelar akademik termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa "Siapapun yang membuat atau memalsukan surat yang dapat memberikan suatu hak, perjanjian, atau pembebasan utang, atau yang dapat digunakan sebagai bukti suatu tindakan, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, dapat dihukum jika penggunaannya menyebabkan kerugian." Sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, pemalsuan gelar akademik merupakan tindak pidana yang tergolong pada kategori pemalsuan dokumen. Pada pasal ini dinyatakan bahwa "Siapapun yang membuat atau memalsukan surat yang dapat memberikan suatu hak, perjanjian, atau pembebasan utang, atau yang dapat digunakan sebagai bukti suatu tindakan, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, dapat dihukum jika penggunaannya menyebabkan kerugian." (Lubis, 2021)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendalami dampak yang ditimbulkan oleh pemalsuan gelar akademik terhadap berbagai aspek etika bisnis dan profesi di BUMD Kota Tanjungpinang. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana pemalsuan gelar akademik mempengaruhi integritas dan moralitas dalam lingkungan bisnis, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BUMD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh BUMD dalam menjaga integritas dan tata kelola yang baik, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi perbaikan praktik-praktik etika dan transparansi dalam manajemen BUMD.

Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana kasus ini terungkap, respon dari berbagai pihak terkait, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dengan memahami implikasi dari tindakan pemalsuan gelar akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan praktik etika di BUMD. Lebih lanjut lagi, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam terhadap dampak dari pemalsuan gelar akademik.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode penelitian ini berisikan tentang uraian atau tata cara dari penelitian guna mengumpulkan dan memperoleh informasi dan data. Fungsi dan metode penelitian ini adalah sebagai wujud pedoman dan landasan tata cara untuk melakukan penelitian pada saat menulis suatu karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, analisis dokumen, dan tinjauan literatur. Analisis dokumen merupakan metode serbaguna dalam penelitian kualitatif yang memberikan wawasan mendalam tentang konteks dan perspektif yang kompleks dalam materi tekstual. Dengan melakukan pemeriksaan yang teliti dan sistematis, penelitian ini mengungkap kedalaman informasi. Pengumpulan data adalah suatu bentuk proses dan merupakan tahapan awal penelitian yang sifatkan wajib serta mutlak untuk dilakukan karena sumber penelitian adalah data yang akan diteliti. Studi kasus ini difokuskan pada BUMD di Kota Tanjungpinang yang terlibat skandal pemalsuan gelar akademik di setiap data diri. Metode yang digunakan dapat memberikan pemahaman pada tingkat lebih lanjut bagi peneliti terhadap implikasi dari kasus ini. Wawancara dengan salah satu mantan karyawan yang masih bekerja saat kasus terjadi, dilakukan demi mengumpulkan informasi yang akurat. Analisis dokumen dan tinjauan literatur digunakan untuk mengkaji konteks dan latar belakang dari kasus ini disertai untuk memahami praktik terbaik dalam etika bisnis dan profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implikasi bagi Etika Bisnis

Pemalsuan gelar akademik mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam penerapan etika bisnis dan profesi di BUMD tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa standar etika dalam proses rekrutmen, seleksi, dan pengawasan pimpinan perlu diperkuat. Pemalsuan gelar juga menciptakan preseden negatif yang dapat mempengaruhi moral dan etika karyawan lainnya. Tidak adanya standar etika, karyawan mungkin merasakan bahwa perilaku yang dilakukan secara tidak etis dapat ditoleransi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan moral etika dan peningkatan risiko terjadinya pelanggaran etika lainnya, seperti penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

4.2 Implikasi terhadap Hukum

Pemalsuan gelar akademik merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Hal ini tertera dalam pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang pemalsuan dokumen, termasuk ijazah atau gelar akademik. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana, dengan ancaman hukuman penjara bagi individu yang terbukti bersalah. Dalam kasus Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang, tuduhan ini memicu penyelidikan oleh pihak kepolisian dan mengarah pada pemeriksaan saksi-saksi serta pengumpulan bukti-bukti yang relevan. Investigasi yang dilakukan oleh kepolisian membuktikan bahwa tindakan pemalsuan gelar ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Walaupun pada akhirnya laporan dicabut oleh pelapor, penyelidikan awal hingga pemeriksaan pada saksi-saksi memberikan petunjuk bahwa dalam kasus ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk diangkat ke proses pengadilan. Hal ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa terjadi keadilan pada penegakan hukum serta memberikan efek jera yang semestinya.

4.3 Studi Kasus: Dugaan Pemalsuan Gelar oleh Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang

Dalam banyak organisasi atau lembaga, terutama yang berbasis di sektor publik atau korporat, seringkali ada persyaratan tertentu untuk posisi seperti direktur utama. Gelar akademik tertentu

atau latar belakang pendidikan yang relevan sering dianggap sebagai syarat atau keuntungan dalam proses seleksi untuk posisi tersebut. Misalnya, gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang seperti ekonomi, manajemen, atau teknik dapat dianggap sebagai aset yang menguntungkan.

Kasus ini bermula sejak masuknya karyawan baru berinisial 'H' sebagai Kepala Divisi Operasional di BUMD Kota Tanjungpinang. Ia diberikan perlakuan khusus oleh Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang yang berinisial 'F' berupa gaji dibayar di muka, sedangkan karyawan lainnya dibayar setelah sebulan bekerja. Pelaporan kasus pemalsuan gelar oleh karyawan berinisial 'H' ini dikarenakan adanya konflik pribadi di luar instansi antara 'H' dan 'F'. Sehingga membuat 'H' membuat keputusan untuk melaporkan tindakan 'F' yang memalsukan gelar akademik demi kedudukan sebagai Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang. Kasus ini mencerminkan dinamika etika yang kompleks, di mana penyelesaian masalah melalui jalur informal dan kepentingan pribadi mengalahkan prinsip-prinsip etika yang seharusnya dipegang teguh.

“Terjadi konflik kepentingan internal di dalam ruang lingkup pekerjaan. Verifikasi atau seleksi mengenai gelar akademik yang digunakan atau diperoleh sejujurnya kurang dapat dipastikan, namun sepertinya ini berkaitan dengan siapa yang menanam saham terbanyak. Terdapat karyawan baru yang berinisial 'H' yang langsung menjabat sebagai kepala divisi. Belum satu bulan masa kerja, karyawan tersebut sudah menerima gaji, istilahnya gaji yang dibayar dimuka. Namun perlakuan khusus itu hanya berlaku untuk karyawan berinisial 'H' tersebut, walaupun karyawan lain harus bekerja selama satu bulan terlebih dahulu baru ia mendapatkan gaji.” Ungkap salah satu informan kunci yang saat dilakukan wawancara.

Pihak kepolisian mendapatkan laporan dugaan pemalsuan gelar akademik ini, pihak kepolisian memulai penyidikan terhadap kasus ini. Pihak kepolisian memeriksa kurang lebih 10 saksi yang terkait dalam kasus ini (Rakyat, 2020). Pihak kepolisian menerima barang bukti berupa ijazah Strata 1 dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan dokumen berisikan penggunaan gelar yang di duplikat dari 'H'. Ia menyebutkan bahwa akta notaris dibuat oleh Kantor Notaris X pada 17 Oktober 2019 lalu. 'H' menerangkan, di dalam akta notaris itu, 'F' mencantumkan gelar Sarjana Sains (S.Si), yang seharusnya merupakan Sarjana Sastra (S.S) (Z. Kepri, 2020). Untuk tindakan pidana bisa dijerat pasal 266 pasal 1 KUHP, dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Tetapi 'H' mencabut tuntutan laporan itu dan mengembalikan gaji yang diterima (H. Kepri, 2020), karena menurutnya hal tersebut berupa hak prerogatif ia untuk berdamai. Tanpa paksaan orang ataupun iming-iming untuk mendapatkan jabatan dikarenakan itu hanya kesalahan gelar KTP.

Tersangka pemalsuan gelar benar dinyatakan sebagai lulusan sarjana tetapi di KTP dan dokumen-dokumen lainnya bergelar Sarjana Sains (S.Si) bukan Sarjana Sastra (S.S) setelah diperiksa benar bahwa 'F' lulusan sarjana dari universitas islam. Ia dianggap hanya kesalahan di KTP maka dari itu ia dapat tetap menjabat sebagai direktur utama hingga tahun 2022. Kasus dugaan gelar palsu berakhir ditutup oleh pihak kepolisian, meskipun sebelumnya polisi menyatakan kasus ini memenuhi unsur pidana. Di sisi lain, terdapat laporan yang mengungkapkan kekecewaan pelapor terhadap kurangnya respons dari pihak dewan, yang mengindikasikan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini. Kasus dugaan pemalsuan gelar ini mencerminkan kompleksitas etika dalam organisasi, di mana konflik pribadi dan penyelesaian informal seringkali menyelubungi prinsip-prinsip etika yang seharusnya dipegang secara kukuh.

KESIMPULAN

Kasus pemalsuan gelar akademik oleh Direktur Utama BUMD Kota Tanjungpinang telah menimbulkan dampak yang signifikan dan multi-dimensional. Kasus ini mengindikasikan kelemahan dalam penerapan etika bisnis dan profesi di BUMD, menyoroti perlunya peningkatan standar etika dalam proses rekrutmen dan seleksi pimpinan. Secara hukum, tindakan ini jelas melanggar Pasal 263 KUHP dan menyoroti pentingnya penegakan hukum untuk mencegah praktik pemalsuan gelar di masa depan. Dengan menggunakan metodologi penelitian yang tepat, seperti pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara mendalam, dapat diperoleh pemahaman mendalam tentang kasus ini serta solusi untuk memperbaiki praktik etika di BUMD.

Dalam artikel yang membahas pemalsuan gelar, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk memperbaiki situasi tersebut. Pertama, diperlukan peningkatan standar etika bisnis dan profesi melalui pendidikan dan pelatihan internal dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka serta mencegah praktik pemalsuan gelar yang merugikan. Kedua, diperlukan peningkatan kesadaran akan implikasi pemalsuan gelar dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam perusahaan. Ketiga, perlu memastikan bahwa klaim atas gelar akademik oleh pemimpin perusahaan adalah valid dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dari beberapa kesimpulan yang ada, saran-saran yang dapat diberikan dalam hal mengatasi dan mencegah pemalsuan gelar akademik, serta memperkuat integritas dalam operasional instansi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dan Pedoman: Menyusun kebijakan yang jelas dan tegas mengenai sanksi bagi pelanggaran pemalsuan gelar akademik serta pedoman untuk pencegahan.
2. Perbaikan Proses Verifikasi: Memperkuat proses verifikasi kredensial akademik selama proses perekrutan dan secara berkala untuk karyawan yang sudah ada.
3. Pendidikan dan Pelatihan: Mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan tentang etika akademik dan integritas untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan karyawan.
4. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan: Memperkuat kerjasama dengan institusi pendidikan lokal dan lembaga sertifikasi untuk memverifikasi kredensial akademik secara akurat.
5. Penguatan Pengawasan Internal: Menguatkan mekanisme pengawasan internal dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beekun, R. I. (2004). *Etika bisnis Islami (Terjemahan Muhammad)* (1 ed.). Pustaka Pelajar.
- Kepri, H. (2020). Hanya di BUMD Pinang, Pelapor Dikasih Jabatan, Gajinya Bayar Depan, Kasus Pun Dicabut. *Harian Kepri*. <https://www.hariankepri.com/hanya-di-bumd-pinang-pelapor-dikasih-jabatan-gajinya-bayar-depan-kasus-pun-dicabut/>
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid. Sus/2021/PN. Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285–300. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Lubis, M. R. (2021). Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu. *PKM Maju UDA*, 2(1), 49–61. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1184/1015>
- Naufal, M. I. G. P. (2023). *TINDAK PIDANA PEMALSUAN MENGGUNAKAN GELAR TANPA HAK GELAR AKADEMIK DAN GELAR PROFESI (STUDI PUTUSAN NOMOR 265/PID.SUS/2022/PN JMB)* [Universitas Batanghari]. <http://repository.unbari.ac.id/2403/>
- Rakyat, B. (2020). Polisi Periksa 10 Saksi Soal Dugaan Gelar Palsu Dirut BUMD Tanjungpinang. *Media Online Barometer Rakyat*. <https://barometerrakyat.com/polisi-periksa-10-saksi-soal-dugaan-gelar-palsu-dirut-bumd-tanjungpinang/>
- Kepri, Z. (2020). Ini Sebab Dirut BUMD Tanjungpinang Dilaporkan Polisi. *Zona Kepri*. <https://zonakepri.com/ini-sebab-dirut-bumd-tanjungpinang-dilaporkan-polisi/>